

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus intoleransi agama telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai negara di dunia. Salah satu contoh nyata adalah serangan terhadap komunitas minoritas Rohingya di Myanmar, yang menyebabkan ribuan orang harus mengungsi akibat diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Konflik kelompok Sunni dengan kelompok Syiah di Timur Tengah sudah terjadi dalam beberapa decade, menciptakan ketegangan yang mendalam di wilayah tersebut. Konflik-konflik ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi lintas agama dalam menciptakan pemahaman bersama dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

Diskriminasi terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, China, merupakan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dituduhkan kepada pemerintah China. Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi HAM dan badan PBB, pemerintah China dituding melakukan serangkaian pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi penahanan massal di kamp-kamp yang disebut sebagai "pendidikan ulang", praktik kerja paksa, pembatasan kebebasan praktik keagamaan, pengawasan negara yang ketat, serta upaya sistematis untuk menghancurkan budaya Uyghur.

Human Rights Watch (2021) dalam laporannya menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah China terhadap Uyghur dan Muslim Turkic lainnya di Xinjiang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tersebut mendokumentasikan berbagai bukti pelanggaran seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, dan kekerasan seksual, serta pelanggaran hak-hak dasar lainnya¹.

Senada dengan temuan tersebut, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) dalam laporan tahun 2022 juga menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM serius terhadap Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Laporan OHCHR menyoroti kredibilitas tuduhan penyiksaan, kekerasan seksual, dan kerja paksa di kamp-kamp penahanan, serta pembatasan hak-hak budaya dan agama. Kedua laporan ini secara tegas menyerukan pemerintah China untuk segera mengakhiri pelanggaran HAM dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas tindakan pelanggaran tersebut.

Di tingkat nasional, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa. Sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi, kasus intoleransi sering kali muncul, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas maupun konflik antarumat beragama. Misalnya, pada tahun 2016 terjadi pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil, yang menunjukkan adanya ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya upaya untuk membangun toleransi melalui dialog dan komunikasi antar pemuka agama.

¹ Break Their Lineage, Break Their Roots”: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims (<https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting>), Human Rights, Diakses Kamis, 23 Maret 2023

Indonesia suatu negara dalam keberagaman yang tinggi perihal agama, kasus intoleransi agama juga menjadi perhatian serius. Insiden seperti penolakan pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, hingga ujaran kebencian berbasis agama di media sosial menunjukkan bahwa tantangan intoleransi tidak hanya terjadi di tingkat global tetapi juga domestik. Dalam konteks ini, peran dialog lintas agama menjadi sangat penting untuk membangun hubungan harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda. Dialog ini tidak hanya bertujuan untuk saling memahami keyakinan masing-masing, tetapi juga untuk menciptakan strategi kolaboratif dalam mengatasi berbagai tantangan sosial yang berakar pada intoleransi².

Lebih jauh, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan dialog lintas agama yang efektif dapat menciptakan ruang diskusi yang inklusif, sehingga memungkinkan tercapainya solusi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai contoh, hasil penelitian dari Wahid Foundation (2019) menunjukkan bahwa inisiatif dialog lintas agama di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Maluku dan Kalimantan Barat, berhasil menurunkan tensi konflik dan meningkatkan rasa saling percaya antar komunitas. Oleh karena itu, studi tentang pengembangan strategi komunikasi lintas agama dalam konteks lokal menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan intoleransi agama di Indonesia.³

² Kusuma, JH., & Susilo. *Intercultural and Religious Sensitivity Among Young Indonesian Interfaith Groups*. Jurnal MDPI Ag, Volume 11 (2020), (1), h. 26.

³ Akbar ICRS, “Kemajuan Tanpa Penyelesaian Akar Masalah: Laporan Kemerdekaan/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 di Indonesia”, <https://kbb.id/2020/07/20/kemajuan-tanpa-penyelesaian-akar-masalah-laporan-kemerdekaan-berkeyakinan-kbb-tahun-2019-di-indonesia/>” Diakses Rabu, 23 Maret 2023

Pluralitas telah menjadi karakteristik intrinsik masyarakat global kontemporer. Konsekuensinya, diperlukan model pengelolaan yang adaptif dan dapat diakomodasi oleh berbagai entitas sosial. Kelalaian dalam mengelola potensi keragaman ini berisiko memicu disonansi sosial hingga eskalasi konflik. Konflik keagamaan, khususnya, merupakan manifestasi dari ketegangan hubungan yang berpotensi memprovokasi disrupti. Secara sosiologis, konflik keagamaan memiliki karakteristik yang rumit, kompleks, dan resisten terhadap resolusi. Implikasinya, tidak jarang konflik-konflik semacam ini mengalami stagnasi dan tidak dapat diselesaikan secara definitif⁴.

Fenomena – fenomena ketegangan konflik dari umat beragama pun dihadapkan dengan momentum hari besar keagamaan tertentu hingga kedudukan sebuah tempat ibadah yang diperdebatkan. Masih hangat pada bulan Maret tahun 2023 ini sekelompok masyarakat melakukan perilaku yang menciderai toleransi umat beragama saat umat Hindu di Bali melaksanakan perayaan ibadah Nyepi. Ditengarai terdapat sekelompok masyarakat di Sunberklampok, Buleleng keluar rumah saat Hari Raya Nyepi dan memaksa membuka portal jalan yang ditutup oleh Pecalang. Aksi percekcoakan itu menuai keributan antar warga yang memaksa melewati portal jalan yang ditutup oleh Pecalang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran guna mengkondusifkan keamanan saat Nyepi. Kemudian terjadi pembubaran paksa jemaat gereja yang tengah beribadah dari salah satu oknum RT setempat di Bandar Lampung. Tindakan ini mempermasalahkan perizinan atas pendirian dan pelaksanaan kegiatan gereja

⁴ Asep Saeful Mutadi, *Komunikasi Lintas Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)

yang masih belum mendapatkan titik terang antara pengurus gereja dengan masyarakat setempat yang diwakili oleh oknum RT tersebut.

Keterangan dari Ketua Panitia Ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Parlin Sihombing menyatakan, pihak gereja telah mengajukan syarat-syarat yang dibutuhkan dengan maksud menjadikan tempat ibadah, tetapi izin tak kunjung keluar sejak 2014, serta gereja tersebut telah dibangun pada tahun 2009. Pada tahun 2014 dukungan warga setempat atas pendirian gereja dengan ditandainya 75 KTP dari warga setempat menyetujui pendirian gereja, ditambah dengan jemaat pada saat itu mencapai 100 orang. Beberapa prosedur yang berlaku telah kita ajukan sebagai proses perizinan mulai dari dukungan warga setempat, namun belum perizinan tersebut kita mendapatkannya.⁵

Persoalan ini seakan menjadi bom waktu yang akan meledak pada waktu yang tidak dapat ditentukan dan kapan saja akan meledak, baik dengan gesekan konflik horizontal di tengah masyarakat, terdapat yang pro dan kontra atas pendirian tempat ibadah di dalam sebuah komunitas masyarakat yang berbeda berdasarkan keyakinannya. Peristiwa tersebut menyulut bentuk persekusi dari seorang oknum RT setempat di Rajabasa Bandar Lampung untuk melakukan intimidasi dibarengi dengan pembubaran paksa jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) yang sedang berlangsung proses ibadahnya.

Hal tersebut didokumentasikan pada sebuah video amatir beredar pada sosial media yang direkam oleh salah satu jemaat gereja yang tengah beribadah,

⁵ Jaya & Tri Purna, "Soal Status Gereja di Lampung yang Dibubarkan Ketua RT, Pengurus: Syarat Sudah Diajukan tapi Izin Tak Keluar." <https://regional.kompas.com/read/2023/02/20/173839378/soal-status-gereja-di-lampung-yang-dibubarkan-ketua-rt-pengurus-syarat?page=all>, Diakses Rabu, 23 Maret 2023

kemudian video tersebut menjadi *viral*. Video yang berdurasi 1 menit 7 detik itu memperlihatkan oknum Ketua RT mengenakan kaos berwarna biru dan topi, masuk ke dalam gereja dan mengusir para jemaat yang tengah berlangsungnya prosesi ibadah, selain itu oknum Ketua RT tersebut memukul ponsel yang dipegang seorang jemaat yang sedang merekam perilakunya.⁶ Dari fenomena tersebut berawal dari segi administratif atas pembangunan status gereja yang tak kunjung ada kejelasan prosedur, hingga berakhir dengan tindakan – tindakan intoleransi di tengah masyarakat yang memicu perpecahan antar sesama umat beragama, berkaitan dengan adanya yang mendominasi dan didominasi atas identitas keagamaan di suatu wilayah. Meledaknya bom waktu seakan mencederai kebersamaan yang tengah terjalin sebagai bangsa yang bersatu, merdeka, dan melindungi segenap warga negaranya tanpa membedakan identitas masing – masing pemeluk agamanya.

Mengukur dari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 (17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2022), perilaku intoleransi berdasarkan antar umat beragama yang dapat memicu perpecahan mampu diminimalisir ataupun frekuensinya menurun tiap wilayah baik kota/kabupaten di Indonesia. Menjadi sebuah suguhan dari naik turunnya konflik antar umat beragama di Indonesia tetaplah menyisakan luka dan duka menyelimuti dari pihak-pihak yang diminioritaskan ternegasikan oleh pihak yang mayoritas dalam sebuah komunitas masyarakat, adanya alienasi dari kelompok yang terpinggirkan dari sebuah tatanan masyarakat

⁶ Jaya & Tri Purna, “*Soal Status Gereja di Lampung yang Dibubarkan Ketua RT, Pengurus: Syarat Sudah Diajukan tapi izin Tak Keluar*.”
<https://regional.kompas.com/read/2023/02/20/173839378/soal-status-gereja-di-lampung-yang-dibubarkan-ketua-rt-pengurus-syarat?page=all>, Diakses Rabu, 23 Maret 2023

yang utuh. Masih teringat 17 Juli 2015 dengan peristiwa kerusuhan konflik yang terjadi di Kabupaten Tolikara Papua, antara umat Islam dengan Kristen setempat. Ditengarai terdapat pertentangan yang telah lama dari identitas komunitas pemeluk agama tersebut di tengah masyarakat. Ditandai dengan penyebabnya pengeras suara yang sering digunakan umat muslim mengganggu proses ibadah mereka di Gereja Injil di Indonesia (GIDI), dan tepat pada hari tersebut umat muslim merayakan ibadah hari idulfitri dan pada bersamaan jemaat Gereja Injil di Indonesia (GIDI) tengah melangsungkan kegiatan ibadah di hari yang sama, Peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang intoleran terhadap umat muslim yang tepat pada saat itu menjalankan ibadah salat idul fitri dan merayakan hari kemenangan idulfitri 1436 H, mengakibatkan kerusakan pemukiman hingga 1 masjid terbakar, ditambah dengan 1 orang tewas dan beberapa orang luka-luka.

Terlebih dari akar masalah di Tolikara Papua tersebut mengenai permasalahan konflik agama yang timbul diungkapkan oleh direktur Setara Institute Hendarli mengatakan, bahwa akar dari penyerangan Tolikara ialah ketidakadilan dan diskriminasi yang berkelanjutan.⁷ Upaya rekonsiliasi dan beberapa pendekatan komunikasi baik struktural dan kultural dijalankan guna terciptanya kerukunan antar umat beragama di wilayah masyarakat yang terdampak konflik agama.

Upaya demikian dalam menghadapi ketegangan yang telah tercipta di Tolikara Papua, dalam seremonial kegiatan pertemuan Acara yang telah berlangsung dari tanggal 13-15 Agustus tahun 2015 itu diikuti oleh sekitar 100

⁷ Faiz Nashrillah, "Akar Konflik Tolikara Adalah Diskriminasi dan Ketidakadilan", <https://www.tempo.co/politik/akar-konflik-tolikara-adalah-diskriminasi-dan-ketidakadilan-nbsp--1433602>, Diakses Rabu, 23 Maret 2023, 20.13

tokoh agama di Papua, ketika saat itu yang menjabat sebagai Menteri Agama yakni Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa terdapat ada tiga upaya Pemerintah yang dilakukan untuk mengembalikan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama di Tolikara, Papua. Ketiga hal itu adalah rehabilitasi, penegakan hukum, dan peningkatan dialog antar umat beragama, penguatan dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) menjadi penting dari proses memfasilitasi ruang-ruang komunikasi dan mempererat persaudaraan, serta menyamakan pandangan dalam menyikapi keragaman.⁸

Beberapa serangkaian secara resolusi konflik dalam penanganan konflik Tolikari Papua ini pun dihadapkan oleh motif pendorong terciptanya beririsan secara faktor agama, politik, ekonomi dan kebudayaan, menjadi pelengkap dalam mengurai fenomena dari konflik serta resolusi guna memetakan dalam akar permasalahan dari intoleransi umat beragama.

Memaknai konflik dari George Simmel yakni dimaknai bahwasanya konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, layaknya menghancurkan sebuah kebersamaan antar individu maupun kelompok, ia berpendapat bahwasanya konflik merupakan bentuk dasar dari interaksi antar individual maupun kelompok, sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Justru Simmel menyatakan bahwa yang berpotensi ketegangan suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya suatu keterlibatan interaksi antar individual

⁸ Administrator, “*Tiga Upaya Pemerintah Pulihkan Tolikara*”, <https://kemenag.go.id/nasional/tiga-upaya-pemerintah-pulihkan-tolikara-matil3>, Diakses Rabu, 23 Maret 2023, 20.20

maupun kelompok.⁹ Dari pernyataan Simmel ini konflik merupakan sebuah cara guna menciptakan ruang-ruang saluran komunikasi di tengah masyarakat dalam memaksimalkan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, terlebih dalam kerukunan umat beragama.

Sinergitas di dalam lingkungan bermasyarakat merupakan sebuah pengimplementasian falsafah bangsa kita Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika (*walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua*) dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Menjadi sebuah dinamika yang berjalan, baik dikondisikan atau berjalan cair begitu saja apa adanya. Layaknya bagian-bagian yang terpisah dalam sebuah permainan *puzzle*, sinergitas sebagai perekat guna meredakan konflik yang berbeda baik suku, agama, ras dan budaya di dalam masyarakat, guna membangun integrasi sebuah ciri identitas masyarakat di suatu tempat. Pendiri bangsa Indonesia ini mengamanatkan untuk terwujudnya kesatuan dalam bingkai keberagaman maka dibangun gagasan Pancasila, sebagai pedoman arah berjalannya negeri Republik Indonesia ini. Cara pandang bangsa ini menegaskan di dalam Pancasila yakni sila ke -3 “Persatuan Indonesia”, sebagai tolak ukur pentingnya dalam membangun jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Fenomena keberagaman dalam bingkai persatuan tersebut menjadi tatanan yang tak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia dalam memandang perbedaan sebagai sesuatu kekuatan dengan maksud menciptakan kondisi Indonesia yang kaya akan identitas budaya-nya, suku-nya hingga keberagaman

⁹ Maria Ulfa, “Teori Konflik Menurut George Simmel”, <https://tirto.id/teori-konflik-menurut-george-simmel-penjelasan-tentang-konsepnya-gihb>, Diakses Rabu, 23 Maret 20.45

dalam beragama-nya. Konteks tersebut tidak bisa ditawar kembali menjadi sebuah perpecahan hingga konflik tak berkesudahan di tengah masyarakat.

Landasan yuridis pada Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan pedoman berbangsa dan bernegara menegaskan secara tertulis mengenai kebebasan beragama dan prakteknya pada pasal 29 menyatakan bahwa “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan dari bunyi pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, memiliki makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Untuk ini merupakan hadirnya peran negara dalam aspek sosial dan kebudayaan guna dapat menjaminnya warga negara Indonesia dapat hidup berdampingan dalam memeluk agamanya masing-masing.

Identitas keragaman masyarakat Indonesia yang tercipta hampir menyertai provinsi-provinsi di Indonesia begitu pula di Jawa Barat. Menjadi fokus tersendiri menengok Jawa Barat secara umum sebagai provinsi dengan dinamika masyarakatnya yang beragam dan terdiri dari berbagai etnis, agama dan kebudayaan menyertainya. Terkait Jumlah kasus konflik antaragama berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus

adalah 15, turun -40% Nilai rata-rata jumlah kasus tiap tahun adalah 39,67 dalam 3 Tahun terakhir.¹⁰

Jawa Barat dengan ibukota provinsi yakni Kota Bandung menyuguhkan dengan keanekaragaman suku, budaya dan agama menyertai identitas masyarakatnya dalam tumbuh dan berkembang membangun Kota Bandung. Heterogenitas sosial serta arus urbanisasi menjadi ciri karakter dari Kota Bandung yang ditandai dengan mobilisasi penduduk amat pesat, dengan corak karakter kebudayaan dan umat beragama yang beragam identitasnya. Sebuah keniscayaan Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat sebagai rumah kedua bagi para pendatang yang hijrah dan menetap baik sementara dan permanen di Kota Bandung. Berbagai macam etnis dan agama saling melebur apa adanya di tengah masyarakat, secara tidak langsung sejalan dengan maksud tujuan bangsa ini yakni Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan dalam keberagaman pun lahir mengakar dalam sejarah perkembangan masyarakat Kota Bandung dalam dinamika bermasyarakat sehari-hari, sebagai hal yang wajar berbagai corak warna identitas suku dan etnis dapat melangsungkan kebudayaannya sebagai implementasi pelaksanaan dalam bentuk kegiatan tanpa ada halangan dan penghadangan dari pihak manapun, begitu pula dengan konteks umat beragama sekelompok umat bergama dapat hidup berdampingan dengan identitas umat beragama yang lainnya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keberagaman yang tercipta di Kota Bandung pun lahir dan timbul tak bisa dihindari bermula dari keberadaan yang telah mengakar sebagai bagian dari

¹⁰ Administrator, “Jumlah Kasus Konflik Antaragama Berdasarkan Desa/Kelurahan DI Jawa Barat”, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kasus-konflik-antaragama-berdasarkan-desakelurahan-di-jawa-barat>, Diakses Rabu, 23 Maret 21.10

sejarah lokal antara sesama elemen masyarakat yang ada sebelumnya, hingga keberagaman elemen masyarakat karena diciptakan oleh keadaan, baik diakomodir oleh masyarakat itu sendiri atau oleh pemerintah setempat menciptakannya melalui regulasi dan kebijakan. Ditambah dengan adanya urbanisasi hingga mobilitas sosial penduduk diantaranya menjadi pendatang, kemudian menjadi penduduk tetap, dari keberagaman inilah menimbulkan potensi dan menambah keberagaman serta menjadi ciri khas Kota Bandung. Dari situ, memunculkan dampak positif bagi Kota Bandung, keberagaman menghasilkan kesatuan, berbaur antar umat beragama maupun antar kalangan identitas penduduk lainnya.

Dengan populasi penduduk Kota Bandung mencapai 2.530.448 jiwa, melahirkan keberagaman yang beragam satu sama lain secara kultur dan sosial menyertainya berdinamika dalam membangun Kota Bandung, terlihat berdasarkan agama dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tahun 2023 menunjukkan yaitu dari populasi penduduk 2.530.448 jiwa terdiri dari 2.332.429 jiwa dengan persentase (92,17 %) beragama Islam, 130.787 jiwa beragama Kristen dengan persentase (5,16 %). Populasi 54.216 jiwa beragama Katholik dengan persentase (2,14 %), beragama Hindu dengan 1.620 jiwa dengan persentase (0,06 %), beragama Buddha sebesar 11.085 jiwa dengan persentase (0,43%), beragama Konghucu sebesar 166 jiwa dengan persentase (0,006%) serta terakhir beragama penghayat kepercayaan sebanyak 145 jiwa dengan persentase (0,005%). Menjadi populasi terbanyak umat beragama di Kota Bandung didominasi oleh umat Islam dan paling sedikit yakni oleh penghayat kepercayaan.

Keberagaman yang ada di Kota Bandung telah eksis dari dulu yang lahir turun temurun sampai saat ini menandakan keberagaman tersebut telah menghasilkan kerukunan antar umat beragama bagi masyarakat Kota Bandung yang kini genap berusia 213 tahun, terdiri dari elemen masyarakat secara sosial dan kultur bahu membahu dalam merawat kesadaran antar umat beragama sebagai modal dalam membangun kebersamaan dengan diimplementasikan hidup guyub, bersatu dalam bingkai moderasi beragama. Dalam Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran, dari 10 kota yang memiliki tingkat heterogenitas agama yakni Kota Bandung berada di peringkat ke- 6 dengan skor 5,00 (peringkat ke- 6 sampai 10 yakni Bandung, Bitung, Dumai, Magelang, Pematang Siantar), skor 6,00 (peringkat ke- 1 – 5 yakni Batam, Palangkaraya, Singkawang, Sorong dan Surakarta).

Manifestasi dari rajutan keberagaman yang telah ada, kemudian dijadikan implementasi kebijakan pemernintah Kota Bandung ketika Ridwan Kamil menjabat sebagai Walikota Bandung. Ridwan Kamil mendapatkan penghargaan dari Komnas HAM. Pemerintah Kota Bandung menerima penghargaan atas konsistensinya dalam menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rahmat, pada penutupan Kongres Nasional Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, pada Kamis, 16 Maret 2017. Penilaian yang mengantarkan Kota Bandung pada penghargaan ini didasarkan pada penerbitan tiga kebijakan publik yang menjadi landasan perlindungan hak KBB. Kebijakan-kebijakan tersebut

meliputi: (1). Larangan unjuk rasa di tempat ibadah: Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan ketertiban tempat ibadah, serta mencegah potensi konflik atau gangguan terhadap kegiatan keagamaan. (2). Penggunaan gedung pertemuan untuk kepentingan insidental: Kebijakan ini memfasilitasi penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan atau kepercayaan yang bersifat sementara, sehingga memberikan ruang yang fleksibel bagi komunitas dalam menjalankan praktik keagamaannya. (3) Jaminan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan: Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap individu dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa hambatan atau diskriminasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil, selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung, menekankan bahwa Indonesia dicirikan oleh keberagaman, sehingga upaya pemaksaan keseragaman harus dihindari. Apabila terjadi perbedaan, ia menekankan pentingnya pendekatan melalui instrumen komunikasi dan peran negara untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi konstruktif.

Penghargaan yang diterima dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi dasar bagi perumusan kebijakan keberagaman di Kota Bandung. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan oleh Wali Kota pada saat itu, Ridwan Kamil, melalui program "Kampung Toleransi." Inisiatif ini secara resmi diatur dalam surat edaran nomor 147/SE026-BAKESBANGPOL, yang menguraikan pembentukan kampung toleransi, peran fasilitator, dan mekanisme pelaksanaannya. Implementasi program ini didelegasikan kepada instansi terkait,

khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung. Bakesbangpol bertugas mendeklarasikan jaringan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kecamatan, yang beroperasi di bawah koordinasi pelaksana tugas di wilayah tersebut.

Bapak Dadang Setiawan, selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menjelaskan fokus strategis lembaganya dalam mempertahankan dan meningkatkan status Kota Bandung sebagai kota toleransi. Dalam kerangka ini, Kesbangpol berencana mengembangkan suatu proyek percontohan multikultural yang merepresentasikan miniatur keberagaman bangsa. Inisiatif ini dirancang sebagai respons terhadap adanya perbedaan kepercayaan dan suku bangsa di Indonesia, dengan tujuan utama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tenteram di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bandung diketahui memiliki program spesifik bernama 'Kampung Toleransi'. Proyek ini diproyeksikan akan diimplementasikan di setiap kecamatan di Kota Bandung, mengindikasikan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas dan menginternalisasi nilai-nilai toleransi secara merata di seluruh wilayah administrative.¹¹

Pembangunan "Kampung Toleransi" di Kota Bandung menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah kota untuk mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan penjaminan hak asasi manusia (HAM). Inisiatif ini mencerminkan sinergi kebijakan yang bertujuan membentuk lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Bapak

¹¹ Luki Hardianti, Sikapi Perbedaan, Kota Bandung Buat 'Kampung Toleransi', <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/17/03/09/omjhlx396-sikapi-perbedaan-kota-bandung-buat-kampung-toleransi>, Diakses Rabu 23 Maret 21.25

Hikmat Ginanjar, menyatakan bahwa Kampung Toleransi berfungsi sebagai wadah komunal yang mengakomodasi beragam keyakinan agama dan kebudayaan yang ada di Kota Bandung. Konsep ini ditekankan sebagai kapital sosial yang esensial untuk menciptakan kondisi aman dan damai bagi seluruh warga. Lebih lanjut, pembentukan Kampung Toleransi diharapkan dapat menjadi platform efektif untuk komunikasi, silaturahmi, dan kolaborasi (gotong royong) di antara seluruh elemen masyarakat.¹²

Pembangunan dari Kampung Toleransi di Kota Bandung ini telah dibangun secara bertahap di beberapa titik kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung diantaranya *pertama*, RW 04 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler atau yang sering dikenal dengan Gang Luna. *Kedua*, RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong atau yang sering dikenal dengan Gang Ruhana. *Ketiga*, di wilayah Jalan Sasak Gantung Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol. *Keempat*, Kompleks Dian Permai RW 11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay. *Kelima*, RW 08 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir merupakan Kampung Toleransi yang baru dideklarasikan oleh Wakil Walikota Yana Mulyana pada tahun 2019.

Merujuk Siaran Pers yang disiapkan oleh Humas Kota Bandung mengenai Pernyataan Yana Mulyana sebagai Wakil Walikota Kota Bandung disela mendeklarasikan penambahan Kampung Toleransi di Jalan Vihara RW 08 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir. Yana menyatakan hadirnya kampung toleransi bisa menjaga toleransi antar umat beragama, suku, dan ras. Kota

¹² Tri Ispranoto, “Semangat Menjaga Kerukunan di Kampung Toleransi Bandung”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4016218/semangat-menjaga-kerukunan-di-kampung-toleransi-bandung>, Diakses Rabu, 21.30

Bandung sebagai kota heterogen harus menjadi salah satu cerminan di Indonesia. Empat kampung toleransi sebelumnya itu, kehidupannya rukun, saling membantu dan menghargai.

Selain itu hasil temuan sebuah tren dan dinamika toleransi secara aspek regulasi sosial ialah ditemukan indikator peristiwa intoleransi, menemukan bahwa 10 kota dengan skor paling rendah, yakni 7 kota yang merupakan kota-kota terbesar sekaligus ibukota provinsi. 7 kota tersebut adalah: Padang, Pangkal Pinang, Banda Aceh, Bandung, Medan, Makassar, dan DKI Jakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi sebagai kota besar dengan tingkat interaksi sosial paling dinamis serta latar belakang warganya yang paling beragam menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan suatu perhatian pengelolaan toleransi yang lebih besar dibanding kota-kota yang lebih kecil. Hal ini juga dapat berarti bahwa kualifikasi kepemimpinan pada kota-kota tersebut membutuhkan standar tinggi. Aspek tersebut menjadi tantangan atas dinamika Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduknya mencapai 2.530.448 jiwa, harus mampu dalam membenahi dan mengurus dinamika sosial dan budaya masyarakatnya yang heterogen.

Tindakan – tindakan yang berlawanan dari makna toleransi tersebut ialah intoleransi. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan apa yang dikonstruksi oleh pemerintah Kota Bandung dengan pembangunan Kampung Toleransinya. Intoleransi merupakan tindakan yang berlawanan dengan toleransi itu sendiri yang dimana terjadi beberapa peristiwa atau kejadian yang mencederai semangat toleransi beragama di Kota Bandung.

Di awal tahun 2020. Hal ini menjadi wacana yang kontradiktif ketika pemerintah Kota Bandung mengadakan parade lintas budaya dan agama dengan mengusung tajuk ‘Bandung Rumah Bersama’, rencana tersebut sempat didemo oleh sekelompok orang intoleran pada proses persiapannya, namun acara pun akhirnya digelar dengan nama baru. Saat membuka acara tersebut, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan parade ini adalah milik semua golongan, Oded menegaskan bukan untuk merayakan sebuah kebudayaan, bukan juga perayaan ibadah sebuah agama. Oded menyerukan dengan berkumpulnya semua elemen lintas agama pada acara tersebut bahwa Bandung adalah rumah bersama. Rumah dari berbagai agama, dari suku, budaya, yang ada di Indonesia. Oded pun menepis penilaian sebagian kalangan bahwa Bandung kota intoleran, dengan meninjau dahulu di publik, Jawa Barat intoleran, tapi Bandung adalah kota toleransi. Bandung adalah rumah bersama, tegasnya dari Walikota Bandung Oded M Danial ketika membuka acara tersebut.¹³

Berangkat dari sudut pandang Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam bahwasanya upaya dalam menyerukan kebaikan terhadap sesama berlangsung pada tataran komunitas masyarakat yang homogen atas suatu identitas keagamaan yang sama. Namun kini aktivitas dakwah perlu dihadapkan dengan kondisi kontemporer dengan medan dakwah yang bervariasi baik segmentasi internalisasi umat muslim dan eksternalisasi berbeda dalam kebersamaan dengan umat non-muslim, dengan maksud bermuara pada mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Era kontemporer menghadirkan

¹³ Rio Tuasikal, “Bandung Rumah Bersama Berupaya Perbaiki Citra Toleransi, <https://www.voaindonesia.com/a/bandung-rumah-bersama-berupaya-perbaiki-citra-toleransi/5291234.html>, Diakses Rabu, 23 Maret 2023, 21.45

kompleksitas tersendiri dalam aktivitas dakwah, khususnya di wilayah dengan heterogenitas komunitas keagamaan, seperti kampung toleransi. Dalam konteks ini, pengembangan metode penyampaian dakwah, baik secara komunikasi verbal maupun non-verbal (melalui perilaku atau tindakan), menjadi krusial dan menuntut pendekatan yang variatif serta unik.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa penyebaran dan syiar Islam tidak lagi terbatas pada komunitas dengan mayoritas identitas keagamaan Islam. Oleh karena itu, diperlukan investigasi dan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana aktivitas dakwah Islam dapat berintegrasi dan berinteraksi secara efektif dengan komunitas beridentitas keagamaan lain dalam suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi dakwah yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan toleransi dan koeksistensi antarumat beragama. Disamping itu peranan dari masing-masing tokoh agama sebagai representatif keterwakilan antar umat beragama memiliki orientasi dalam merawat dan menjaga suatu dinamika bermasyarakat di tengah perbedaan yang terjadi.

Kesadaran akan nilai toleransi merupakan fondasi esensial bagi stabilitas dan kekuatan tatanan bangsa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Persatuan elemen masyarakat menjadi keniscayaan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai ini memiliki kapasitas untuk menyatukan pandangan dan pemikiran seluruh komponen bangsa, sehingga berkontribusi pada pencapaian dan pemeliharaan status sebagai bangsa yang merdeka.

Secara lokal, di RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, keberagaman agama menjadi cerminan miniatur Indonesia. Wilayah ini ditempati oleh masyarakat dari beberapa latar belakang agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di RW 02 berinteraksi satu sama lain dalam berbagai kegiatan sosial, seperti perayaan hari besar keagamaan, kerja bakti, dan diskusi bersama. Namun, keberagaman ini juga membawa potensi konflik bila pengelolaannya tidak baik. Karenanya, komunikasi antar pemuka agama di wilayah ini menjadi faktor penting dalam menjaga harmoni sosial.

Menurut Liliweri (2014), komunikasi antarbudaya dapat menjadi jembatan untuk memahami perbedaan dan menciptakan harmoni dalam kehidupan yang pluralistik. Dalam konteks RW 02, pemuka agama memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kelompok agama yang berbeda.¹⁴ Mereka bukan hanya menjadi peran pemimpin agama, namun sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Peran ini sejalan dengan pendapat Samovar, Porter, dan McDaniel (2017), mengungkapkan bahwa pemimpin komunitas memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang konstruktif antar kelompok yang berbeda keyakinan.¹⁵

Di sisi lain, keberadaan teknologi juga membuka peluang baru dalam memperkuat komunikasi lintas agama. Media sosial dapat digunakan oleh pemuka agama untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi kepada audiens yang lebih luas. Sebagai contoh, kegiatan lintas agama di RW 02 dapat didokumentasikan dan

¹⁴ Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. (Jakarta: Kencana, 2011)

¹⁵ Samovar, L.A. et.al., *Communication Between Cultures*. (Boston: U.S Wadsworth Publishing, 2009)

dibagikan melalui platform digital, sehingga menjadi inspirasi bagi komunitas lain. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh pemuka agama.

Dalam konteks globalisasi, penting juga untuk mencermati bagaimana dinamika internasional memengaruhi pola komunikasi lintas agama di tingkat lokal. Sebagai contoh, sentimen global terhadap kelompok agama tertentu dapat berdampak pada sikap masyarakat lokal. Konteks ini sependapat dengan pandangan Appadurai, yang mengatakan bahwa globalisasi menciptakan "*mediascapes*" yang membentuk persepsi publik terhadap isu-isu tertentu. Oleh karena itu, pemuka agama perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks global agar dapat merancang strategi komunikasi yang relevan di tingkat lokal.

Tujuan penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola komunikasi antar pemuka agama di RW 02 Kelurahan Paledang, serta bagaimana komunikasi tersebut dapat membangun toleransi di kalangan pengikutnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konsep yang dipakai oleh pemuka agama dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan praktis untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal dalam merancang program-program berbasis toleransi yang efektif. Dengan

memahami pola komunikasi yang berhasil, berbagai pihak dapat mengadaptasi strategi ini untuk diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi lintas budaya dan lintas agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Gudykunst dan Kim, pemahaman lintas budaya merupakan kunci utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peran pemuka agama dalam menciptakan harmoni sosial di masyarakat yang beragam.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menunjukkan pentingnya komunikasi lintas agama dalam membangun toleransi di masyarakat yang beragam. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi praktis untuk menghadapi tantangan keberagaman agama, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, simpulan judul dalam kepenulisan laporan penelitian ini yakni **Komunikasi Antar Pemuka Beda Agama Dalam Membangun Toleransi Pengikutnya (Penelitian di RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung).**

B. Fokus Penelitian

Komunikasi yang dilakukan oleh pemuka agama memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di masyarakat, terutama di wilayah dengan keberagaman agama yang tinggi. Di Kampung Toleransi, Kecamatan Lengkong, peran pemuka agama tidak hanya terbatas pada

penyampaian ajaran agama, tetapi juga mencakup upaya menciptakan ruang dialog yang inklusif dan mendorong terciptanya kehidupan yang toleran. Bagaimana pemuka agama berkomunikasi dengan pengikutnya menjadi faktor kunci dalam membentuk pemahaman bersama yang dapat mengatasi potensi konflik berbasis agama. Lebih jauh, efektivitas komunikasi ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya membangun masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga harmonis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemuka agama serta dampaknya terhadap kehidupan sosial di Kampung Toleransi Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, yang dapat dirincikan fokus penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pemuka agama membangun komunikasi dengan pengikutnya di Kampung Toleransi RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung?
2. Bagaimana implikasi dari komunikasi tersebut terhadap terwujudnya masyarakat toleran dan harmoni?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu.

1. Mengkaji peran komunikasi pemuka agama dalam membangun nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat Kampung Toleransi Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung

2. Mengevaluasi dampak dari komunikasi pemuka agama terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis dan bebas konflik di Kampung Toleransi Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang didapatkan dari kegunaan penelitian dipergunakan untuk :

1. Secara akademis penulisan hasil penelitian ini menjadi bermanfaat bagi pengembangan wacana, studi, riset dan diskursus program studi komunikasi dan penyiaran islam dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktek berdasarkan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian).
2. Secara Praktis Kampung Toleransi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemuka agama dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk membangun hubungan yang inklusif dan toleran di masyarakat, menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang mendukung nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial, serta memberikan rekomendasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya komunikasi yang inklusif dalam menciptakan kehidupan yang damai di tengah keberagaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyediakan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan atau regulasi yang mendorong keberagaman dan toleransi berbasis komunikasi lintas agama.

E. Landasan Pemikiran

Kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural sering kali diwarnai oleh interaksi antara individu dan kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, toleransi menjadi nilai fundamental yang diperlukan untuk menciptakan harmoni sosial. Menurut Giddens, pluralitas dalam masyarakat modern harus dikelola dengan baik melalui mekanisme komunikasi yang inklusif. Komunikasi yang efektif menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan dan memperkuat hubungan antar individu maupun kelompok.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kasus intoleransi berbasis agama menjadi tantangan besar di Indonesia. Studi dari Wahid Foundation menunjukkan bahwa sikap intoleransi di masyarakat kerap dipicu oleh kurangnya dialog lintas agama dan pemahaman terhadap perbedaan keyakinan. Dalam konteks ini, pemuka agama memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama tetapi juga sebagai mediator yang mampu membangun jembatan pemahaman di antara pengikutnya. Upaya ini memerlukan pendekatan berbasis komunikasi yang terencana dan berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara komunikasi berlangsung di masyarakat modern. Buckingham menekankan bahwa kemampuan literasi digital menjadi penting bagi individu maupun kelompok untuk memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi yang efektif. Pemuka agama kini memiliki peluang besar untuk menggunakan media digital sebagai platform untuk menyebarkan pesan toleransi dan mendorong dialog lintas agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali

bagaimana pemuka agama membangun komunikasi dengan pengikutnya dan bagaimana implikasi dari komunikasi tersebut terhadap terciptanya masyarakat toleran dan harmonis.

1. Landasan Konseptual

Toleransi dalam konteks kehidupan beragama adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan keyakinan serta memberikan ruang bagi agama lain untuk berkembang dan diamalkan oleh pemeluknya tanpa adanya tekanan, diskriminasi, atau kekerasan. Toleransi tidak berarti menyamakan semua agama atau mencampuradukkan ajaran, tetapi lebih kepada menghormati hak asasi setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing.

Dalam masyarakat multicultural seperti Indonesia, toleransi menjadi landasan penting bagi keberlangsungan hidup Bersama yang damai. Keragaman agama, suku, dan budaya menuntut hadirnya sikap saling menghormati dalam bingkai kebangsaan. Toleransi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga integritas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Toleransi menjadi kunci dalam membangun kohesi sosial di tengah perbedaan yang ada. Abdullah juga menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi dan interaksi sosial dalam menanamkan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat, khususnya melalui peran para tokoh agama.

Kondisi toleransi yang berkembang dalam lingkungan masyarakat tertentu tidak tumbuh dengan sendirinya, justru ada factor-faktor yang mempengaruhi

serta menjadikan toleransi tersebut berjalan, baik jalinan antar agama, antar budaya, antar suku dan lainnya. Azyumardi menyatakan bahwa toleransi tidak tumbuh secara instan, melainkan harus dibangun melalui proses panjang seperti pendidikan, dialog, dan keterbukaan antarumat beragama. Ia mengingatkan bahwa tanpa komunikasi dan saling pengertian, perbedaan agama dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, komunikasi antar pemuka agama menjadi instrumen vital dalam membentuk kesalingpahaman yang konstruktif.

Penting bagi kita memahami bagaimana komunikasi menjadi peran vital dalam membangun toleransi bagi antarumat beragama dalam membentuk persepsi keterbukaan untuk berdialog, membentuk kesalingpahaman antarumat berbeda agama dalam satu tujuan yaitu menjadikan toleransi sebagai pijakan kehidupan bersosial sehari-harinya.

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam) menempatkan toleransi sebagai prinsip fundamental dalam hubungan antarumat manusia. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain, di antaranya, Q.S Al-Kafirun (109) : 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝١

Artinya:

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (Al – Qur'an dan

Tejemahannya, Balitbang Diklat Kemenag RI).

Indonesia, dengan lanskap budayanya yang kaya dan masyarakatnya yang majemuk, senantiasa diuji dengan isu toleransi. Gesekan antar kelompok,

perbedaan pandangan, dan potensi konflik seringkali menjadi tantangan dalam menjaga harmoni. Di tengah kompleksitas ini, Al-Qur'an melalui surah Al-Kāfirūn menawarkan sebuah prinsip mendasar dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, yang relevansinya tetap abadi hingga kini.

Ayat keenam surah Al-Kāfirūn, (*Lakum dīnukum wa liya dīn*), yang berarti "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku," mengandung makna yang dalam tentang batas-batas toleransi dalam ranah keyakinan. Tafsir Kementerian Agama secara ringkas menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan tidak adanya tukar-menukar dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Bagi kaum kafir, keyakinan kemusyrikan mereka, dan bagi umat Islam, agama yang telah Allah pilihkan.

Lebih jauh, Tafsir *Tahlili* menyoroti bahwa ayat ini juga mengandung ancaman sekaligus penegasan tanggung jawab individual atas perbuatan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat (2) : 139

فَلْأَنذَرُوكُنَّا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾
Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah kamu (Yahudi dan Nasrani) hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal, Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.” (Al – Qur’an dan Tejemahannya, Balitbang Diklat Kemenag RI).

"Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu." Hal ini menggarisbawahi bahwa setiap individu akan mempertanggungjawabkan keyakinan dan amalnya di hadapan Allah.

Lantas, bagaimana kita memaknai ayat ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multireligius? Ayat ini bukanlah seruan untuk saling menjauhi atau memutus tali silaturahmi. Justru sebaliknya, ia menjadi landasan kokoh untuk membangun toleransi yang sejati, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain tanpa harus mencampuradukkan atau mengikuti ritual peribadatan mereka.

Spirit Al-Kāfirūn mengajarkan kita untuk:

1. Menghormati perbedaan keyakinan: Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan atau intimidasi. Ayat ini secara tegas mengakui validitas agama lain bagi pemeluknya.
2. Fokus pada kesamaan nilai-nilai kemanusiaan: Meskipun berbeda dalam teologi dan ritual, berbagai agama seringkali memiliki nilai-nilai universal yang sama, seperti kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan gotong royong. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi landasan interaksi sosial.
3. Menghindari sinkretisme agama: Ayat ini memberikan batasan yang jelas bahwa tidak ada kompromi dalam prinsip-prinsip fundamental agama. Umat Islam tidak diperkenankan untuk mencampuradukkan ajaran Islam dengan ajaran agama lain dalam hal ibadah.
4. Membangun dialog dan kerjasama dalam urusan duniawi: Meskipun berbeda dalam keyakinan, umat beragama dapat dan bahkan dianjurkan untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti

mengatasi kemiskinan, menjaga lingkungan, memajukan pendidikan, dan menciptakan kedamaian.

Dalam konteks Indonesia, implementasi spirit Al-Kāfirūn berarti kita harus menjunjung tinggi kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kita harus membangun ruang dialog yang sehat antarumat beragama, saling memahami perspektif masing-masing, dan fokus pada kerja sama dalam membangun bangsa yang lebih baik. Toleransi yang diajarkan oleh surah ini bukanlah toleransi yang lemah dan permisif, melainkan toleransi yang kuat dan berprinsip, yang mengakui perbedaan namun tetap menjalin persatuan dalam keberagaman.

Dengan memahami dan mengamalkan pesan yang terkandung dalam surah Al-Kāfirūn, kita dapat merajut tenun kebangsaan yang kokoh, di mana perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Ayat ini menjadi pengingat bahwa toleransi yang sejati berakar pada penghormatan terhadap keyakinan orang lain, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama yang kita anut. Inilah esensi toleransi yang relevan dan mendasar bagi Indonesia yang kita cintai.

Keberagaman adalah fitrah kehidupan, sebuah realitas yang tak terhindarkan dalam tatanan dunia. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat Islam, memberikan panduan yang komprehensif dalam menyikapi perbedaan. Surah Al-Kāfirūn ayat 6 mengajarkan prinsip toleransi dalam ranah keyakinan yang menekankan batas jelas dalam urusan peribadatan. Adapula firman Allah SWT yang memberikan pemahaman yang lebih luas yaitu Q.S Al-Hujurat ayat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Surah Al-Hujurat membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas tentang tujuan keberagaman manusia yang menggarisbawahi pentingnya saling mengenal di tengah perbedaan. Ayat dari surah Al-Hujurat ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang keberagaman manusia. Beberapa poin penting dari ayat ini yaitu:

Pertama, Asal Usul yang Sama: Seluruh umat manusia berasal dari satu sumber, yaitu Adam dan Hawa. Ini menunjukkan kesetaraan fundamental di antara seluruh manusia, terlepas dari perbedaan suku, bangsa, maupun agama. *Kedua, Tujuan Keberagaman:* Allah menciptakan keberagaman bangsa dan suku agar manusia saling mengenal (*lita'ārafū*). Tujuan dari perbedaan ini bukanlah untuk saling bermusuhan atau merendahkan, melainkan untuk saling berinteraksi, bertukar pengetahuan, dan mengambil manfaat dari keunikan masing-masing. *Ketiga, Ukuran Kemuliaan:* Kemuliaan di sisi Allah tidak diukur berdasarkan keturunan, ras, bangsa, atau kekayaan, melainkan berdasarkan ketakwaan

(*atqākum*). Ini adalah standar nilai yang bersifat universal dan melampaui batas-batas duniawi.

Kedua ayat ini, meskipun membahas aspek yang berbeda, saling melengkapi dalam membangun kerangka pemahaman tentang keberagaman dan toleransi:

1. Pengakuan Keberagaman sebagai Ketetapan Ilahi: Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa adalah kehendak Allah. Sementara itu, surah Al-Kāfirūn secara implisit mengakui keberagaman agama dengan memberikan batasan yang jelas dalam hal keyakinan. Keduanya menyiratkan bahwa perbedaan adalah bagian dari tatanan dunia yang diciptakan oleh Allah.
2. Landasan Interaksi yang Berbeda: Surah Al-Hujurat menekankan interaksi sosial yang positif melalui saling mengenal (*lita'ārafū*) antar kelompok yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman, kerjasama, dan menghindari konflik. Sementara itu, surah Al-Kāfirūn secara spesifik mengatur interaksi dalam ranah teologis dan ritual, di mana batas-batas keyakinan harus dihormati dan tidak dilanggar.
3. Fokus yang Berbeda, Tujuan yang Selaras: Surah Al-Hujurat berfokus pada interaksi sosial dan kesetaraan manusia di hadapan Allah berdasarkan ketakwaan. Surah Al-Kāfirūn lebih fokus pada prinsip teologis tentang tidak adanya kompromi dalam masalah keyakinan. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Toleransi dalam Al-Kāfirūn menjadi prasyarat

untuk mewujudkan saling mengenal dan menghargai yang diamanatkan dalam Al-Hujurat.

Surah Al-Hujurat ayat 13 memberikan konteks yang lebih luas tentang mengapa keberagaman itu ada dan bagaimana seharusnya manusia berinteraksi di tengah perbedaan tersebut, yaitu dengan saling mengenal dan menghormati. Surah Al-Kāfirūn ayat 6 kemudian memberikan panduan spesifik dalam konteks perbedaan agama, yaitu dengan menghormati keyakinan masing-masing dan tidak mencampuradukkan urusan ibadah.

Dengan memahami kedua ayat ini secara bersamaan, kita dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang toleransi. Toleransi bukan hanya sekadar membiarkan orang lain berbeda, tetapi juga aktif berinteraksi dan saling mengenal dalam ranah sosial, sambil tetap menghormati batas-batas keyakinan agama masing-masing. Prinsip "untukmu agamamu, dan untukku agamaku" menjadi landasan yang kokoh untuk membangun hubungan yang saling menghargai di tengah masyarakat yang majemuk, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan penciptaan keberagaman dalam surah Al-Hujurat.

2. Landasan Teori

Penelitian ini menggali dinamika komunikasi antar pemuka agama yang berbeda di tingkat masyarakat, dengan studi kasus di RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana interaksi dan komunikasi yang terjalin di antara para pemuka agama ini berperan dalam membangun dan memelihara toleransi di antara para pengikutnya. Untuk menganalisis fenomena kompleks ini, penelitian ini akan menggunakan lensa dari berbagai kerangka teoretis yang relevan, termasuk Teori

Kontak Antarkelompok, Teori Identitas Sosial, dan Teori Konstruksi Sosial. Kombinasi perspektif teoretis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme bagaimana komunikasi antar pemuka agama dapat menjadi katalisator bagi terciptanya toleransi di tingkat masyarakat.

Pendekatan komunikasi Teori Kontak Antarkelompok (*Intergroup Contact Theory*) yang dikembangkan oleh Gordon Allport (1954) menyatakan bahwa kontak langsung antara anggota kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka antarkelompok dan meningkatkan sikap positif, terutama jika kontak tersebut terjadi dalam kondisi yang mendukung, seperti kesetaraan status, tujuan bersama, kerja sama, dan dukungan dari otoritas.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, interaksi dan komunikasi yang terjalin antara pemuka agama yang berbeda di RW 02 diharapkan dapat menciptakan kondisi-kondisi ideal ini. Melalui dialog, pertemuan, atau kegiatan bersama, para pemuka agama dapat membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi persepsi dan sikap para pengikut terhadap kelompok agama lain.

Selain itu dari perilaku individu penting untuk didalami terkait dengan interpretasi aktivitas dalam konteks komunikasi lintas agama yang terdapat di lokasi penelitian digunakanlah pendekatan Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*) yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner (1979) menyoroti pentingnya identitas kelompok dalam membentuk konsep diri dan perilaku individu.¹⁷ Teori ini menjelaskan bagaimana individu cenderung mengfavoritkan kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan dapat mengembangkan pandangan negatif

¹⁶ Allport, G. W, *The nature of prejudice*, (Addison-Wesley Publishing Company, 1952)

¹⁷ Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). *An integrative theory of intergroup conflict*. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.

terhadap kelompok lain (*outgroup*). Namun, komunikasi yang efektif antar pemuka agama dapat berperan dalam membangun identitas superordinat, yaitu identitas kelompok yang lebih inklusif dan melampaui batas-batas agama tertentu. Dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan bersama, persaudaraan sebagai warga masyarakat, atau tujuan bersama dalam membangun komunitas yang harmonis di RW 02, para pemuka agama dapat mengurangi penekanan pada perbedaan agama dan meningkatkan toleransi.

Begitu pula dengan Teori Konstruksi Sosial (*Social Constructionism*) (Berger & Luckmann, 1966) menyatakan bahwa makna dan pemahaman tentang realitas sosial, termasuk konsep toleransi dan hubungan antaragama, tidaklah inheren tetapi dibangun dan dipelihara melalui interaksi sosial dan komunikasi.¹⁸ Melalui dialog, negosiasi makna, dan pembentukan narasi bersama, para pemuka agama dapat berperan aktif dalam mengkonstruksi pemahaman tentang pentingnya toleransi di antara pengikut mereka. Komunikasi yang inklusif dan menekankan nilai-nilai bersama dapat membantu menciptakan realitas sosial di mana perbedaan agama dihargai dan toleransi menjadi norma yang dianut bersama.

Teori kontruksi sosial ini digunakan dalam memetakan hubungan interaksi komunikasi berlangsung yang terdapat di lokasi penelitian sebagai objek penelaahan peneliti. Melalui penggabungan perspektif dari teori-teori ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik komunikasi antar pemuka beda agama di RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota

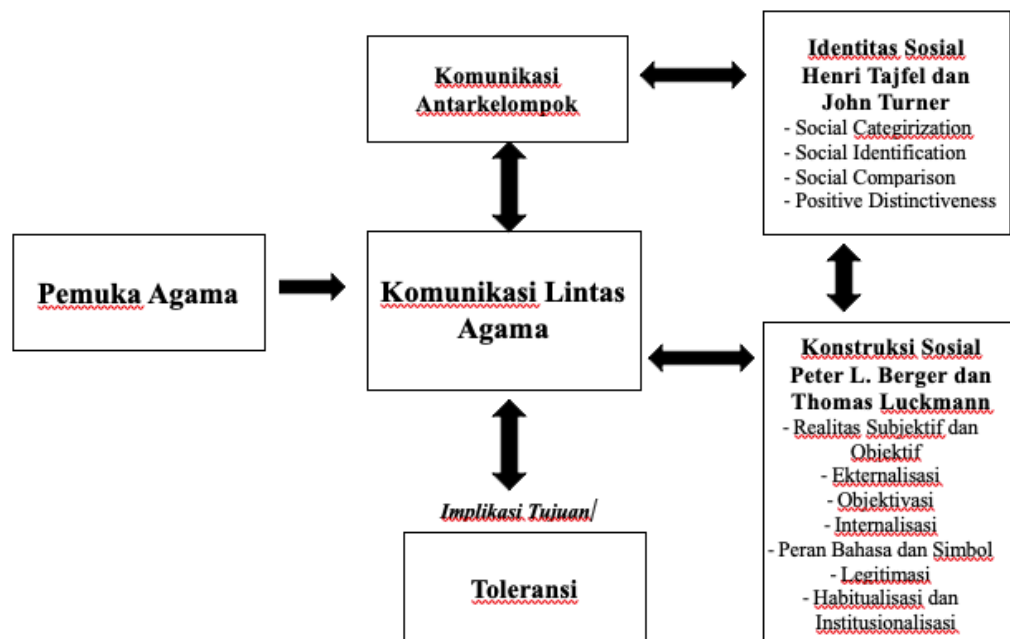
¹⁸ Berger, P. L., & Luckmann, T, *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. (Anchor Books, 1966)

Bandung, memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku toleran di kalangan pengikut mereka. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana interaksi, pembentukan identitas sosial, dan konstruksi sosial makna toleransi terjadi dalam konteks komunikasi antar pemuka agama, serta bagaimana proses-proses ini berkontribusi pada terciptanya toleransi di tingkat pengikut.

Dengan pendekatan – pendekatan tersebut dapat digali sesuai dengan relevansi fokus penelitian. Penemuan data dan fakta di lapangan sebagai instrumen memahami dan mendeskripsikan di Kampung Toleransi RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, meliputi: (1). Tindakan peran pemuka beda agama dalam konteks komunikasi lintas agama serta, (2). Kontruksi sosial yang berkaitan dengan toleransi antar pengukutnya. Dari dua fokus kajian tersebut bermuara pada implikasi dari dinamika masyarakat setempat di Kampung Toleransi RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam kerangka masyarakat multikultur perkotaan berorientasikan atas dasar membangun toleransi antar sesame pemeluk agama.

Menjadi sebuah kesatuan dalam menyatukan perspektif dari pendekatan ilmu komunikasi sebagai landasan pokok dalam memahami realitas objek sosial masyarakat, dengan dakwah sebagai spirit memahami arti nilai yang perlu dieksistensialisasikan sebagai peran aktif misi dari Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini yang berimplikasi pada varian Islam *Wasatiyah* sebagai wujud moderasi beragama. Hal ini tak terlepas dalam skema kesatuan komunikasi lintas agama dalam memahami, menelusuri dan mengobjekifikasi temuan dari tindakan-tindakan sosial dan pertukaran interaksi simbolik konteks kajian

komunikasi lintas agama guna mengobjektifikasikan temuan peneliti di lapangan. Adapun skema dalam mengidentifikasi dari hubungan tersebut yang berkorelasi satu dengan yang lainnya dapat disimpulkan dibawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Korelasi Topik Kajian
 Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan uraian berbagai perspektif teoretis di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena komunikasi antar pemuka beda agama dalam konteks pembangunan toleransi pengikut merupakan proses sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi komunikasi. Teori Kontak Antarkelompok menyoroti pentingnya interaksi yang berkualitas dalam mengurangi prasangka. Teori Identitas Sosial menjelaskan dinamika identitas kelompok dan potensi pembentukan identitas superordinat. Sementara itu, Teori Konstruksi Sosial memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana makna toleransi

dibangun, diobjektifikasi, diinternalisasi, dan dilegitimasi melalui interaksi dan komunikasi antar pemuka agama.

Kombinasi dari ketiga teori ini menawarkan lensa yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana komunikasi antar pemuka beda agama di RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berkontribusi pada pembangunan toleransi di antara para pengikutnya. Penelitian ini akan berupaya untuk mengaplikasikan konsep-konsep dari teori-teori ini dalam konteks empiris di lokasi penelitian, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika komunikasi antar pemuka agama dan dampaknya terhadap terciptanya masyarakat yang lebih toleran. Dengan demikian, landasan teori ini menjadi pijakan konseptual yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

